BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai tingkat kesiapan implementasi *e-government* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kesiapan berada pada kategori **"Cukup Siap"**, namun belum mencapai kondisi optimal. Adapun rincian kesimpulan berdasarkan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Konektivitas ICT: Infrastruktur dasar melalui Jaringan Intranet Pemerintah (JIP) sudah tersedia, namun kualitasnya belum merata. Masih ditemukan kendala berupa ketidakstabilan jaringan dan keterbatasan *bandwidth* pada area kerja tertentu yang menyebabkan hambatan akses sistem, terutama pada jam kerja sibuk.
2. Penggunaan dan Integrasi ICT: BKAD telah berhasil mengimplementasikan berbagai aplikasi inti seperti SIPD, SIMAKDA, dan SIMBADA yang telah terintegrasi secara fungsional. Namun, integrasi ini belum sepenuhnya ideal karena masih ditemukan adanya kebutuhan input data manual dan kendala sinkronisasi format data antar instansi.

3. Pelatihan: Program pelatihan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi operasional pegawai. Meski demikian, pelaksanaannya masih bersifat reaktif (hanya dilakukan saat ada pembaruan sistem) serta terkendala oleh keterbatasan anggaran dan durasi pelatihan yang dinilai terlalu singkat.
4. Kapasitas SDM: Secara fungsional, pegawai BKAD memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap teknologi digital baru. Tantangan utama terletak pada ketimpangan kompetensi antar kelompok usia serta terbatasnya jumlah tenaga teknis IT spesialis yang ditempatkan secara permanen di tingkat unit kerja.
5. Kebijakan dan Peraturan Pemerintah: Kerangka regulasi tingkat daerah telah mendukung pelaksanaan sistem digital secara memadai. Namun, hambatan utama muncul dari ketidaksinkronan regulasi pemerintah pusat yang sering berubah-ubah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan administratif di tingkat daerah.
6. Infrastruktur: Ketersediaan perangkat keras dasar telah terpenuhi, tetapi banyak perangkat (seperti komputer dan server) yang sudah memasuki usia tua sehingga kinerjanya menurun. Selain itu, masih terdapat kekurangan pada fasilitas cadangan (*backup*) dan dukungan daya listrik (UPS) yang stabil di seluruh unit kerja.
7. Keamanan Akses: Pengamanan dasar melalui penggunaan *username* dan *password* pribadi telah diterapkan. Namun, sistem keamanan masih sangat rentan karena belum adanya pengamanan

berlapis, serta masih rendahnya kesadaran pegawai terkait disiplin keamanan kata sandi dan proteksi data digital.

8. Aplikasi dan Layanan: Aplikasi yang digunakan dinilai memiliki kualitas yang baik dan sangat membantu efisiensi pekerjaan pengelolaan keuangan. Namun, stabilitas aplikasi sering terganggu ketika diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan, dan beberapa fitur belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya pelatihan lanjutan.
9. Akses Informasi: BKAD telah mencapai kemajuan signifikan dalam transparansi informasi melalui situs resmi dan portal portal pemerintah daerah. Kendala akses real-time masih sering terjadi akibat infrastruktur jaringan yang melambat, serta diperlukan penguatan pada pengaturan hak akses berdasarkan peran pengguna agar integritas data tetap terjaga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis merumuskan beberapa saran praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan di BKAD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. **Penguatan Infrastruktur dan Jaringan:** BKAD bersama Diskominfo perlu melakukan audit menyeluruh dan standardisasi jaringan untuk memastikan kestabilan koneksi di seluruh unit kerja. Perlu diprioritaskan peningkatan kapasitas *bandwidth* (khususnya pada area *bottleneck*), penyediaan fasilitas cadangan (*backup*), serta

pengadaan sistem penanggulangan bencana (*Disaster Recovery Plan*) untuk menjaga keberlangsungan operasional digital.

2. **Peningkatan Kapasitas SDM:** Program pelatihan teknologi informasi (TIK) harus dilakukan secara berjenjang, terstruktur, dan rutin, bukan hanya bersifat reaktif saat terjadi pembaruan sistem. Pemerintah daerah juga perlu menambah jumlah tenaga IT profesional di setiap OPD serta membentuk tim *champion user* yang dapat menjadi pendamping teknis bagi pegawai lain di unit kerjanya.
3. **Penguatan Keamanan Data:** BKAD harus segera menyusun dan menguji Prosedur Operasional Standar (SOP) penanganan insiden siber secara berkala. Selain itu, disarankan untuk meningkatkan sistem keamanan dari sekadar penggunaan kata sandi menjadi pengamanan berlapis melalui penerapan *Multi-Factor Authentication* (MFA), enkripsi data, dan penggunaan sistem deteksi intrusi (IDS/IPS).
4. **Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi:** Pemerintah daerah melalui BKAD harus lebih proaktif memberikan umpan balik kepada regulator pusat (kementerian/lembaga terkait) untuk menyelaraskan regulasi keuangan dengan implementasi teknis di daerah. Hal ini penting untuk mengurangi hambatan administratif dan beban penyesuaian sistem yang sering terjadi akibat perubahan kebijakan nasional yang mendadak.

5. **Optimalisasi Fitur Aplikasi:** Perlu dilakukan pengembangan pada tampilan antarmuka aplikasi agar lebih ringkas (*user-friendly*), terutama pada modul input data dan implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara menyeluruh. Integrasi antar sistem juga harus terus disempurnakan untuk mencapai prinsip *interoperabilitas* data yang mulus sehingga dapat meminimalkan proses input manual.

C. Produk Tesis

Sebagai kontribusi praktis terhadap pengembangan *e-government* di daerah, tesis ini menghasilkan sebuah **Policy Brief** yang ditujukan kepada pemangku kepentingan di BKAD Provinsi Sulawesi Selatan. Karya ini merangkum poin-poin kritis mengenai hambatan sinkronisasi regulasi, keterbatasan SDM teknis, dan kerentanan sistem keamanan data ke dalam format naskah kebijakan yang komprehensif. Melalui *Policy Brief* ini, diharapkan hasil riset ini dapat menjadi instrumen advokasi untuk mendorong perbaikan tata kelola digital dan standarisasi infrastruktur teknologi informasi secara lebih terstruktur di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan terkhususnya pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemilihan *Policy Brief* sebagai luaran penelitian ini didasari oleh temuan di lapangan yang menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara regulasi pemerintah pusat dengan implementasi teknis di daerah, serta kebutuhan mendesak akan penguatan infrastruktur dan

keamanan data pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan. Produk ini disusun secara ringkas dan strategis untuk menyajikan rekomendasi solutif bagi para pengambil keputusan, sehingga hasil penelitian ini dapat langsung diimplementasikan dalam bentuk kebijakan nyata guna mempercepat transformasi digital yang aman, efisien, dan berkelanjutan.